

LAPORAN KEUANGAN

20
25

TINGKAT UAPPA-WILAYAH
KANWIL DJKN BANTEN
TA 2025 (AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Serang, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	iv
I Laporan Realisasi Anggaran 1.....	1
II Neraca.....	2
III Laporan Operasional.....	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
A. Penjelasan Umum.....	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	26
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	30
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	35

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp44.230.437.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 175 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp77.395.288.395. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.136.527.375 atau mencapai 53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19.076.870.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Januari 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp215.611.767.086 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10.281.947.527; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp205.303.379.183 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp26.440.376. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.903.743.792 dan Rp205.708.023.294.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp75.762.149.469 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.546.991.250 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp63.215.158.219, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.614.485.850 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp58.600.672.369.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN (2)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp215.742.041.604 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp58.600.672.369 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp6.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(68.636.087.679) sehingga terdapat penurunan entitas sebesar Rp(10.035.409.310) sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp205.706.632.294,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
 (PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Uraian	Catatan	Desember 2025		% thd Anggaran	Desember 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Pendapatan Hibah	B.1.1	-	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	44.230.437.000	77.395.288.395	175%	59.877.690.668
JUMLAH PENDAPATAN		44.230.437.000	77.395.288.395	175%	59.877.690.668
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	11.550.028.000	9.754.827.980	84%	10.018.742.782
Belanja Modal	B.2.3	7.526.842.000	381.699.395	5%	6.881.601.471
JUMLAH BELANJA		19.076.870.000	10.136.527.375	53%	16.900.344.253

NERACA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	59.995.265	18.400.000
Kas Lainnya Setara Kas	C.2	9.856.343.042	19.628.741.914
Pendapatan yang masih harus diterima	C.3	128.480.660	1.449.919.601
Persediaan	C.4	237.128.560	203.307.196
Jumlah Aset Lancar		10.281.947.527	21.300.368.711
ASET TETAP			
Tanah	C.5	152.320.649.000	159.648.258.000
Peralatan dan Mesin	C.6	22.915.343.967	22.779.378.012
Gedung dan Bangunan	C.7	60.459.265.874	60.622.584.874
Aset Tetap Lainnya	C.8	82.889.550	82.889.550
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(30.474.769.208)	(28.975.140.250)
Jumlah Aset Tetap		205.303.379.183	214.157.970.186
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.10	619.530.264	707.019.600
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.11	(593.089.888)	(707.019.600)
Jumlah Aset Lainnya		26.440.376	-
JUMLAH ASET		215.611.767.086	235.458.338.897
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	9.860.729.542	19.700.297.293
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C.14	44.405.250	4.500.000
Utang yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	-	11.500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.905.134.792	19.716.297.293
JUMLAH KEWAJIBAN		9.905.134.792	19.716.297.293
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	205.706.632.294	215.742.041.604
JUMLAH EKUITAS		205.706.632.294	215.742.041.604
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		215.611.767.086	235.458.338.897

LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
 (PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	75.762.149.469	60.875.137.272
Jumlah Pendapatan		75.762.149.469	60.875.137.272
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	159.473.925	211.183.536
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.562.353.953	6.091.537.681
Beban Pemeliharaan	D.5	2.421.073.464	2.274.077.741
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.575.008.036	1.493.696.179
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.829.081.872	2.928.970.614
Jumlah Beban		12.546.991.250	12.999.465.751
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		63.215.158.219	47.875.671.521
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset	D.8	(4.614.485.850)	316.848.789
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(4.614.485.850)	316.848.789
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		58.600.672.369	48.192.520.310
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		58.600.672.369	48.192.520.310

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	215.742.041.604	191.990.777.773
Surplus/ Defisit-LO	E.2	58.600.672.369	48.192.520.310
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	6.000	16.896.456.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	(68.636.087.679)	(41.337.712.479)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(10.035.409.310)	23.751.263.831
EKUITAS AKHIR		205.706.632.294	215.742.041.604



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul *General Ledger* Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan ini memuat informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Anggaran pada Kanwil DJKN Banten.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Periode TA 2025 Kanwil DJKN Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan,
 2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa, dan
 3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- **Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:**
 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

3. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;

2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

5. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkiut Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Variertas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Banten telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, yaitu:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	44.230.437.000	77.395.288.395
Jumlah Pendapatan	44.230.437.000	77.395.288.395
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	11.550.028.000	9.754.827.980
Belanja Modal	7.526.842.000	381.699.395
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	19.076.870.000	10.136.527.375

B1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.395.288.395 atau mencapai 175 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp44.230.437.000 Pendapatan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp77.395.288.395.

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	44.230.437.000	77.395.288.395	175%
Jumlah	44.230.437.000	77.395.288.395	175%

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 29% dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77.395.288.395	59.877.690.668	29%
Jumlah	77.395.288.395	59.877.690.668	29%

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.395.288.395 dan Rp59.877.690.668 Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 29% dari TA 2024.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77.395.288.395	59.877.690.668	29%
Jumlah	77.395.288.395	59.877.690.668	29%

Sedangkan Rincian PNPB lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	313.390.000	314.812.789	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.036.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24.501.750	5.400.000	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	21.506.000	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	620.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian			-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara			-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak			-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas I	68.123.283.198	49.494.586.391	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas II	2.809.399.448	2.894.901.014	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	4.535.608.733	6.194.563.116	-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	197.299.074	926.585.312	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	36.097.393	21.690.601,00	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	14.281.873	25.402.767,00	-
Jumlah	76.075.539.469	59.880.597.990	27%

B2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp10.136.527.375 atau 53% dari anggaran belanja sebesar Rp19.076.870.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	11.550.028.000	9.754.827.980	84%
Belanja Modal	7.526.842.000	381.699.395	5%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19.076.870.000	10.136.527.375	53%

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 53%. Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut:

1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025.
2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.
3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalan Potensi Lelang yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025.

Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	9.754.827.980	10.018.742.782	
Belanja Modal	381.699.395	6.881.601.471,00	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	10.136.527.375	16.900.344.253	-67%

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat DJKN

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.754.827.980 dan Rp10.018.742.782. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -2.63% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Barang Operasional	4.792.635.691	3.629.763.589	
Belanja Barang Non Operasional	748.603.150	1.346.922.599	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	193.295.289	167.105.618	
Belanja Jasa	24.637.350	1.107.177.056	
Belanja Pemeliharaan	2.421.073.464	2.274.077.741	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.575.109.036	1.493.696.179	
Jumlah Belanja Kotor	9.755.353.980	10.018.742.782	-2,63%
Pengembalian Belanja	526.000,00	0	
Jumlah Belanja	9.754.827.980	10.018.742.782	-2,63%

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.699.395 dan Rp6.881.601.471. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.699.395	2.265.423.021	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.616.178.450	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	381.699.395	6.881.601.471	-94%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	381.699.395	6.881.601.471	-94%

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.699.395 dan Rp2.265.423.021. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -83% dibandingkan TA 2024.

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.699.395	2.265.423.021	-83%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	381.699.395	2.265.423.021	-83%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	381.699.395	2.265.423.021	-83%

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.616.178.450. Rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.616.178.450	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	4.616.178.450,00	-100%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	4.616.178.450,00	-100%

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp128.480.660 dan Rp1.449.919.601,-

Adapun rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		Kenaikan/Penurunan (%)
	2025	2024	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	128.480.660	1.449.919.601	-91%
Jumlah	128.480.660	1.449.919.601	-91%

C.3 Belanja di Bayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Belanja di Bayar di Muka adalah sebesar Rp 0- dan Rp 0.

Adapun rincian Kas Belanja di Bayar di Muka adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Belanja di Bayar di Muka	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp237.128.560 dan Rp203.307.196. Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Barang Konsumsi	237.128.560	203.307.196	86%
Jumlah	237.128.560	203.307.196	86%

C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.459.265.874. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	60.459.265.874
Mutasi Tambah :	
Pengurangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	60.459.265.874
Nilai Buku per 31 Desember 2025	60.459.265.874

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp82.889.550. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	82.889.550
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	82.889.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	82.889.550

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.474.769.208 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	22.915.343.967	(19.219.883.765)	3.695.460.202
2	Gedung dan Bangunan	60.459.265.874	(11.254.885.443)	49.204.380.431
	Jumlah	83.374.609.841	(30.474.769.208)	52.899.840.633

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah :	
	-
	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp619.530.264 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain	619.530.264,00	(593.089.888,00)	26.440.376
				-
	Jumlah	619.530.264	(593.089.888)	26.440.376

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.860.729.542 dan Rp19.700.297.293. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

No.	Uraian	2025	2024
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	9.860.729.542	19.700.297.293
	Jumlah	9.860.729.542	19.700.297.293

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp205.706.632.294 dan Rp191.990.777.773. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp76.075.539.469 dan Rp59.877.690.668,- Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 27%. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	313.390.000	314.812.789	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.036.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24.501.750	5.400.000	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	21.506.000	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	620.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	68.123.283.198	49.494.586.391	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	2.809.399.448	2.894.901.014	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	4.535.608.733	6.191.655.794	-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	197.299.074	926.585.312	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	36.097.393	21.690.601	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	14.281.873	25.402.767	-
Jumlah	76.075.539.469	59.877.690.668	27%

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp159.473.925 dan Rp211.183.536. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -24 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024			
Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Persediaan Konsumsi	159.473.925	211.183.536,00	
Jumlah	159.473.925	211.183.536	-24%

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.562.353.953 dan Rp6.070.825.814. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Keperluan Perkantoran	3.621.694.390	3.299.687.420	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	98.893.809	9.630.116	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39.283.440	33.143.913	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	444.160.000	267.960.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	98.462.395	19.323.640	-
Beban Bahan	303.595.876	335.668.159	-
Beban Honor Output Kegiatan	144.075.000	209.100.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	748.603.150	802.154.440	-
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.614.049	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Langganan Air	33.709.500	31.540.500	-
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.624.994	-	-
Beban Jasa Profesi	12.000.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	12.637.350	-	-
Belanja Langganan Listrik	-	969.388.056	-
Belanja Langganan Telepon	-	53.034.570	-
Beban Sewa	-	4.995.000	-
Beban Jasa Profesi	-	35.200.000	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	5.562.353.953	6.070.825.814	-8%

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.421.073.464 dan Rp2.274.077.741. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.287.424.230	1.220.228.180	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	50.151.170	10.682.896,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.083.498.064	1.043.166.665	
Jumlah	2.421.073.464	2.274.077.741	6%

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.574.907.036 dan Rp1.493.696.179. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5.44 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024			
Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Perjalanan Biasa	1.400.860.036	1.313.088.179	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	174.148.000	180.608.000	
Jumlah Beban Perjalanan Dalam Negri	1.575.008.036	1.493.696.179	
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	101.000	0	
Jumlah	1.574.907.036	1.493.696.179	5,44%

D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.829.081.872 dan Rp2.928.970.614. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagaiberikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024			
URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.467.736.930	1.310.800.183	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.359.692.418	1.618.170.431	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	1.652.524		-
	-		-
Jumlah Penyusutan	2.829.081.872	2.928.970.614	-3%
	-		-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
JUMLAH	2.829.081.872	2.928.970.614	-3%

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp313.390.000 dan Rp316.848.789.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.036.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	313.390.000	314.812.789	-
Jumlah	313.390.000	316.848.789	-1%

D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing -masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0- dan Rp0,-.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 dan 2024			
Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024			
Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Pos-pos luar biasa	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp215.742.041.604 dan Rp191.990.777.773.

E.2 Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.600.672.369 dan Rp48,192,520,310. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.000.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp16,896,456,000.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	6.000
Jumlah	6.000

E.4.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(68,636,087,679) dan Rp(41.346.577.915). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	2025	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.136.527.375	16.900.344.253
Diterima dari Entitas Lain	(77.395.288.395)	(59.877.690.668)
Transfer Keluar	(2.325.679.359)	-
Transfer Masuk	948.352.700	1.630.768.500
Jumlah	(68.636.087.679)	(41.346.577.915)

LAPORAN KEUANGAN

20
25

TINGKAT UAKPA - SATKER
KANWIL DJKN BANTEN
TA 2025 (AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Serang, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	iv
I Laporan Realisasi Anggaran 1.....	1
II Neraca.....	2
III Laporan Operasional.....	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
A. Penjelasan Umum.....	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	26
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	30
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	35

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.100.170.735 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 105 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.963.828.000. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.529.004.986 atau mencapai 77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.299.624.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Januari 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp56.351.382.135 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp125.831.033; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp56.225.551.102 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.050.000 dan Rp56.350.332.135.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.877.224.841 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.702.590.929 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp825.366.088, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.774.122.000 dan Rp5.599.488.088 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.599.488.088.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN (2)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp64.735.060.187,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.599.488.088) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp6.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(2.785.245.964) sehingga terdapat penurunan entitas sebesar Rp(8.384.728.052) sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp56.350.332.135,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
 (PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Uraian	Catatan	Desember 2025		% thd Anggaran	Desember 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Pendapatan Hibah	B.1.1	-	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	2.963.828.000	3.100.170.735	105%	2.928.813.615
JUMLAH PENDAPATAN		2.963.828.000	3.100.170.735	105%	2.928.813.615
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	3.243.624.000	2.477.004.987	76%	2.914.118.909
Belanja Modal	B.2.3	56.000.000	51.999.999	93%	4.962.341.050
JUMLAH BELANJA		3.299.624.000	2.529.004.986	77%	7.876.459.959

NERACA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya Setara Kas	C.2	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	C.3	21.411.600	95.565.494
Persediaan	C.4	104.419.433	99.388.505
Jumlah Aset Lancar		125.831.033	194.953.999
ASET TETAP			
Tanah	C.5	25.118.738.000	32.446.347.000
Peralatan dan Mesin	C.6	7.518.488.552	7.859.685.977
Gedung dan Bangunan	C.7	36.274.760.960	36.274.760.960
Aset Tetap Lainnya	C.8	22.507.150	22.507.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(12.708.943.560)	(12.023.894.226)
Jumlah Aset Tetap		56.225.551.102	64.579.406.861
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.10	400.316.514	572.734.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.11	(400.316.514)	(572.734.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		56.351.382.135	64.774.360.860
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	-	34.800.673
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C.14	1.050.000	4.500.000
Utang yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.050.000	39.300.673
JUMLAH KEWAJIBAN		1.050.000	39.300.673
EQUITAS			
Ekuitas	C.17	56.350.332.135	64.735.060.187
JUMLAH EKUITAS		56.350.332.135	64.735.060.187
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		56.351.382.135	64.774.360.860

LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.877.224.841	3.007.522.109
Jumlah Pendapatan		2.877.224.841	3.007.522.109
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	7.421.429	7.929.410
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.392.408.002	1.856.051.760
Beban Pemeliharaan	D.5	691.575.444	596.012.054
Beban Perjalanan Dinas	D.6	378.069.946	452.830.151
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.233.116.108	1.176.454.396
Jumlah Beban		3.702.590.929	4.089.277.771
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(825.366.088)	(1.081.755.662)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset	D.8	(4.774.122.000)	6.702.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(4.774.122.000)	6.702.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5.599.488.088)	(1.075.053.662)
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(5.599.488.088)	(1.075.053.662)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	64.735.060.187	43.939.980.255
Surplus/ Defisit-LO	E.2	(5.599.488.088)	(1.075.053.662)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	6.000	16.896.450.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	(2.785.245.964)	4.973.677.594
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(8.384.728.052)	20.795.079.932
EKUITAS AKHIR		56.350.332.135	64.735.060.187

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
(PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul *General Ledger* Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan ini memuat informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Anggaran pada Kanwil DJKN Banten.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Periode Tahun 2025 Kanwil DJKN Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dandinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihanselesai dilaksanakan,
 2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa, dan
 3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumenlain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- **Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:**
 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

3. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;

2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

5. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkiut Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Variertas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Banten telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, yaitu:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.100.170.735	3.100.170.735
Jumlah Pendapatan	3.100.170.735	3.100.170.735
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.477.004.987	2.477.004.987
Belanja Modal	51.999.999	51.999.999
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.529.004.986	2.529.004.986

B1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.100.170.735,- atau mencapai 105 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.963.828.000. Pendapatan Kanwil DJKN Banten Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah /Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.100.170.7359.

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.963.828.000	3.100.170.735	105%
Jumlah	2.963.828.000	3.100.170.735	105%

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.100.170.735	2.928.813.615	6%
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615. Penerimaan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.100.170.735	2.928.813.615	6%
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

Adapun rincian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.242.000	6.702.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	5.400.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	2.883.553.342	2.894.901.014	-
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	120.000	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	21.506.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	36.097.393	21.690.601	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52.000	-	-
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2024.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.100.170.735	2.928.813.615	6%
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

Sedangkan Rincian PNPB lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.242.000	6.702.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	5.400.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	2.883.553.342	2.894.901.014	-
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	120.000	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	21.506.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	36.097.393	21.690.601	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52.000	-	-
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

B2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah Rp2.529.004.986 atau 77% dari anggaran belanja sebesar Rp3.299.624.00,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.243.624.000	2.477.004.987	76%
Belanja Modal	56.000.000	51.999.999	93%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3.299.624.000	2.529.004.986	77%

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 77%. Peningkatan realisasi belanja antara lain, sebagai berikut:

1. Terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada TA 2025.
2. Adanya peningkatan pagu anggaran pada belanja barang terutama pada belanja barang operasional, belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.
3. Terdapat peningkatan pagu bersumber PNPB yang berasal dari Rincian Output (RO) baru pada lingkup Kanwil DJKN banten yaitu Risalah Lelang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Penggalan Potensi Lelang yang mengakibatkan meningkatnya pagu anggaran tahun 2025.

Adapun rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	2.477.004.987	2.914.118.909	
Belanja Modal	51.999.999	4.962.341.050,00	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	2.529.004.986	7.876.459.959	(49,43)%

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak adanya Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 disebabkan Kantor Wilayah DJKN banten telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2020 beralih ke Kantor Pusat DJKN

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.477.004.987 dan Rp2.914.118.909. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -15% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Barang Operasional	1.171.644.397	1.049.640.940	
Belanja Barang Non Operasional	211.262.843	336.717.788	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.452.357	9.904.539	
Belanja Jasa	12.000.000	469.013.437	
Belanja Pemeliharaan	691.575.444	596.012.054	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	378.069.946	452.830.151	
Jumlah Belanja Kotor	2.477.004.987	2.914.118.909	-15,00%
Pengembalian Belanja	-	0	
Jumlah Belanja	2.477.004.987	2.914.118.909	-15,00%

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.999.999 dan Rp4.962.341.050. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.999.999	646.150.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.316.191.050	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	51.999.999	4.962.341.050	-99%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	51.999.999	4.962.341.050	-99%

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.999.999 dan Rp646.150.000. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar -92% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.999.999	646.150.000	-92%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	51.999.999	646.150.000	-92%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	51.999.999	646.150.000	-92%

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.316.191.050. Rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.316.191.050	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	4.316.191.050,00	-100%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	4.316.191.050,00	-100%

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, rincian sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Rincian Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana terlampir:

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

C.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah masing-masing sebesar Rp21.411.600 dan Rp95.565.494,-

Adapun rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 & 2024			
Uraian	REALISASI		Kenaikan/Penurunan (%)
	2025	2024	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21.411.600	95.565.494	(74.153.894)
Jumlah	21.411.600	95.565.494	-78%

C.3 Belanja di Bayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Per 31 Desember 2025 dan 2024, saldo Belanja di Bayar di Muka adalah sebesar Rp 0- dan Rp 0.

Adapun rincian Kas Belanja di Bayar di Muka adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Belanja di Bayar di Muka	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah Persediaan (Barang Konsumsi) adalah masing-masing sebesar Rp104.419.433,- dan Rp99.388.505,- Adapun rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Barang Konsumsi	104.419.433	99.388.505	95%
Jumlah	104.419.433	99.388.505	95%

C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36,274,760,960. Saldo tersebut mengalami kenaikan dengan adanya penyelesaian pembangunan dengan KDP, berupa pematangan lahan & pembangunan pagar Rusunara. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	36.274.760.960
Mutasi Tambah :	
Pengurangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	36.274.760.960
Nilai Buku per 31 Desember 2025	36.274.760.960

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp22.507.150. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	22.507.150
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	22.507.150
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	22.507.150

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.084.305.952 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.518.488.552	(6.455.296.030)	1.063.192.522
2	Gedung dan Bangunan	36.274.760.960	(6.253.647.530)	30.021.113.430
	Jumlah	43.793.249.512	(12.708.943.560)	31.084.305.952

- **C.8 Aset Lain-lain**

- Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp400.316.514,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	400.316.514
Mutasi Tambah :	
	-
	-
	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	400.316.514
	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	400.316.514

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp400.316.514,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	400.316.514	(400.316.514)	-
	Jumlah	400.316.514	(400.316.514)	-

C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp34.800.673,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

No.	Uraian	2025	2024
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	34.800.673
	Jumlah	-	34.800.673

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.350.332.135,- dan Rp64.735.060.187. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.100.170.735 dan Rp2.928.813.615. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6%. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.242.000	6.702.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	5.400.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	2.883.553.342	2.894.901.014	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	21.506.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	36.097.393	21.690.601	-
Jumlah	3.100.170.735	2.928.813.615	6%

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp7.421.429 dan Rp7.929.410. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -6 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Persediaan Konsumsi	7.421.429,00	7.929.410,00	
Jumlah	7.421.429	7.929.410	-6%

D.1 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.404.860.359 dan Rp1.865.276.704. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 25 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Keperluan Perkantoran	983.730.136	949.501.511	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.625.428	3.608.689	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.097.200	5.855.100	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98.560.000	71.352.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	76.132.395	19.323.640	-
Beban Bahan	31.187.843	92.337.788	-
Beban Honor Output Kegiatan	144.075.000	209.100.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36.000.000	35.280.000	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.452.357	9.904.539,00	-
Beban Langganan Listrik	-	418.572.480,00	-
Beban Langganan Telepon	-	24.240.957,00	-
Beban Jasa Profesi	12.000.000	26.200.000,00	-
Jumlah	1.404.860.359	1.865.276.704	-25%

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp691.575.444 dan Rp596.012.054. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya kegiatan renovasi gedung. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	437.403.714	378.093.335	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	19.980.000	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.191.730	217.918.719	
Jumlah	691.575.444	596.012.054	16%

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp378.069.946 dan Rp452.830.151. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16.51% disebabkan oleh penurunan yang tidak signifikan, karena kegiatan di efisiensi semaksimal mungkin. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Perjalanan Biasa	351.965.946	421.450.151	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.104.000	31.380.000	
Jumlah Beban Perjalanan Dalam Negri	378.069.946	452.830.151	
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	
Jumlah	378.069.946	452.830.151	-16,51%

D.6 Beban Peenyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.233.118.133 dan Rp1.176.456.420. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

URAIAN	REALISASI		%
	2025	2024	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	377.880.125	364.380.324	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	855.235.983	812.074.072	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1.233.118.133	1.176.456.420	5%
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
JUMLAH	1.233.118.133	1.176.456.420	5%

D.7 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp152.242.000 dan Rp6.702.000.

Uraian	REALISASI		%
	2025	2024	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.242.000	6.702.000	-
Jumlah	152.242.000	6.702.000	2172%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64.735.060.187 dan Rp43.939.980.255.

E.2 Surplus / Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(5.599.488.088) dan Rp(1.075.053.662). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.000.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	6.000
Jumlah	6.000

E.4.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2.785.245.964) dan Rp4.973.677.594. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	2025	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.529.004.986	7.876.459.959
Diterima dari Entitas Lain	(3.100.170.735)	(2.928.813.615)
Transfer Keluar	(2.368.949.565)	-
Transfer Masuk	154.869.350	26.031.250
Jumlah	(2.785.245.964)	4.973.677.594